

Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah

*Anna Yulia Hartati*¹

Abstract

Trade liberalization has been claimed as one prime mover of environment degradation. This article discusses the contradiction between environment and trade liberalization. It suggests that in order to met the interest of both of them, the concept of sustainable development can be applied.

Kata-kata kunci: *lingkungan hidup, liberalisasi perdagangan, sustainable development*

Pendahuluan

Secara riil ada pemahaman bahwa bisnis perdagangan dan lingkungan hidup adalah dua kondisi yang tidak dapat berjalan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, salah satu harus dikorbankan demi eksistensinya yang lain. Saat ini globalisasi dengan geliat liberalisasi perdagangan yang bermotif kapitalistik justru semakin menampakkan keberadaannya. Kondisi tersebut berarti ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi.

Tata ekonomi dunia dewasa ini yang pro pasar (industrialisasi), kerap dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Lebih dari seperempat perdagangan barang dagangan di dunia ini melibatkan barang-barang yang langsung diturunkan dari basis sumber daya alam yang

¹ Anna Yulia Hartati adalah Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

menyangga perekonomian global. Sebagian besar negara berkembang mendominasi ekspor barang-barang tersebut jika dibanding dengan negara-negara industri. Kondisi ini disamping menguntungkan karena mendatangkan devisa, di sisi lain negara-negara berkembang sangat rawan terhadap kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berbasis sumber daya alam.

Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi (GNP, pembangunan, industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan. Mendamaikan keduanya merupakan *mission impossible*, namun betapapun kecil kemungkinannya, senantiasa diupayakan ada celah untuk melihat kedua hal yang bertentangan tersebut, termasuk upaya untuk mencari jalan tengahnya. Tulisan ini diawali dari pemahaman mengenai liberalisasi perdagangan Versus Ekologis, kasus Indonesia pada era Orde Baru yang ditandai dengan sistem ekonomi terbuka, dilema negara berkembang termasuk Indonesia, serta upaya mencari jalan tengah bagi lingkungan hidup dan liberalisasi perdagangan. Tulisan ini mencoba memanfaatkan celah-celah kompromi melalui wacana *Sustainable Development* sebagai upaya kearah ekologis, hingga bumi yang jumlahnya satu tetap bisa memenuhi kebutuhan makhluk di atasnya untuk masa kini dan akan datang.

Liberalisasi Perdagangan Versus Ekologis

Isu liberalisasi perdagangan dunia mengemuka terutama sejak ditandatanganinya Putaran Uruguay dan setelah WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 menggantikan posisi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Dengan disyahkannya organisasi perdagangan dunia tersebut, maka perdagangan internasional telah memiliki suatu institusi yang menjadi landasan dasar bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan internasional dengan segala implikasinya. Sementara isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam

hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio De Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990.² Pertemuan berkala Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan ini merupakan pertemuan tingkat global yang pertama dalam sejarah dunia. Dalam KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tahun 1992 yang menghasilkan Agenda 21, memuat program yang harus dilaksanakan (*action program*) di bidang lingkungan dan pembangunan.

Sejak tahun 1970-an masalah lingkungan telah dirasakan umat manusia sebagai persoalan bersama yang menuntut pengelolaan bersama pula oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Fenomena-fenomena seperti pemanasan global, lubang ozon, hujan asam menjadi sumber ketakutan manusia. Komitmen negara-negara baik negara maju maupun negara berkembang untuk melestarikan lingkungan hidup global tidak diragukan lagi.

Akan tetapi komitmen ini selalu diwarnai konflik kepentingan yang terutama melibatkan negara-negara maju di satu pihak dan negara-negara berkembang di pihak lain. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak di Stockholm. Bagi negara maju persoalan lingkungan terutama disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (*over exploitation*) dalam rangka pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan bagi negara berkembang sumber permasalahan terutama ada pada negara-negara maju yaitu dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup yang mewah dan boros, telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran pada lingkungan.

Munculnya era liberalisasi perdagangan yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa dan maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif menimbulkan pertanyaan, apakah era perdagangan bebas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan

² Richard W. Mansbach (1997). *Global Puzzle: Issues and actors in Global politics*. Boston: Houghton Mifflin Company, hal.14.

(*environmental concern*) terutama di negara berkembang yang mengalami gap ekonomi tajam terhadap negara maju. Paling tidak ada dua hal yang menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang yaitu³. *Pertama*, kekhawatiran tentang munculnya faktor lingkungan sebagai hambatan baru bagi perdagangan internasional (*Disguised non tariff trade barrier*) oleh negara maju terhadap negara berkembang. Kekhawatiran ini muncul antara lain dengan adanya persyaratan-persyaratan perdagangan dari negara-negara maju seperti *Ecolabelling* dan *ISO 14000* yang menuntut suatu produk untuk memenuhi kriteria lingkungan tertentu dengan dalih tekanan konsumen (*consumer's driven*). Apalagi dalam mekanisme GATT/WTO berlaku asas "*National treatment*" (perlakuan nasional). Dengan prinsip ini maka persyaratan lingkungan yang ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain kalau persyaratan tersebut juga diberlakukan terhadap pelaku-pelaku kegiatan usaha di lingkup nasionalnya. *Kedua*, Kekhawatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Dalam hal ini negara-negara berkembang dikhawatirkan menjadi "*pollution Havens*" (sampahnya polusi, tempat polusi). Hal ini terkait dengan fenomena NIMBY (*Not In My Back Yard*)⁴ yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian masyarakat mende-sak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Sepintas kebijakan itu mulia membantu masyarakat negara berkembang, tetapi dibelakangnya ada pengalihan industri kotor dan penjualan *second hand technology*, yang diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Dengan demikian liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global.

³ Di kutip dari INFO RIO+10, diterbitkan oleh Konphalindo dalam <http://www.pelangi.or.id/resources>

⁴ M. Baiquni dan Susilawardani, (2002). *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana, hal 193.

Kasus di Indonesia

Di bawah rezim Orde Baru, pemerintah mengadakan reformasi ekonomi tertutup menuju sistem ekonomi terbuka yang ditandai dengan liberalisasi rezim perdagangan internasional ⁵(membebaskan lalu lintas devisa dan penyatuan tingkat nilai tukar). Pada periode ini perdagangan luar negeri mulai berperan penting dalam penerimaan negara. Strategi industrialisasi yang dianut pemerintah pada awal-awal Orde Baru adalah substitusi impor terutama untuk barang-barang konsumsi. Sedangkan perdagangan luar negeri pada saat itu mengandalkan komoditas Migas, yang didukung harga yang baik di pasaran internasional. Komoditi migas tetap menjadi unggulan hingga awal 80-an. Pada tahun 1982 terjadi krisis harga minyak di pasar internasional membawa dampak negatif pada sumbangan devisa dari Migas. Hal ini memaksa pemerintah untuk mendiversifikasikan komoditi non migas. Upaya untuk mendorong sektor non migas ditempuh dengan melaksanakan reformasi di bidang perdagangan pada tahun 1985. Sejumlah hambatan tarif dan non tarif dipotong.

Kebijakan ini akhirnya mengantar sektor industri menjadi primadona ekspor non migas. Melihat struktur industri yang berkembang, sebagian besar merupakan industri yang berbasis pada SDA dan padat karya "*natural resource*" dan "*labor base*". Hal ini berhubungan dengan limpahan SDA dan tenaga kerja dengan upah yang murah di dalam negeri. Sifat industrialisasi di dalam negeri yang banyak mengandalkan SDA akan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dalam hal penipisan SDA disamping itu juga pencemaran yang berasal dari limbah buangnya.

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar (lebih dari 200 juta jiwa), masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan masih merupakan masalah yang akut dalam proses pembangunannya. Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekhawatiran-kekhawatiran negara-negara berkembang pada umumnya menjadi kekhawatiran Indonesia. Misalnya ketentuan *Ecolabelling/wood sertification programme*, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi

⁵ Huib Poot, Arie Kuyvenhoven, Jaap Jansen, (1990). *Industrialization and Trade in Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 249-250

tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia ketentuan ini memanifestasikan ketakutan negara-negara maju yang kuatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu.

Dilema Lingkungan Hidup di Era Perdagangan Bebas

Mengglobalnya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Di satu sisi komitmen mereka terhadap lingkungan tampak dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan konferensi Stockholm maupun hasil KTT Bumi kedalam perundang-undangan nasionalnya. Dalam hal ini Indonesia memiliki alat maupun hukum seperti UU Lingkungan Hidup, Peraturan AMDAL bagi proyek yang akan didirikan dan berpotensi mencemari lingkungan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengolahan Lingkungan), memiliki kementerian lingkungan hidup dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik itu standar manajemen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar internasional. Kalau di lingkup internasional terdapat organisasi standar internasional ISO (*International Standardization Organization*) yang mengelola standar-standar dunia maka di Indonesia terdapat Dewan Standar Nasional (DSN) yang mengadopsi ketentuan-ketentuan ISO dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk mensiasati ketentuan ecolabel, Indonesia juga telah mendirikan sebuah lembaga Ecolabel Indonesia.

Namun di sisi lain kepentingan ekonomi sangat mendesak untuk terus menghasilkan lebih banyak lagi devisa untuk meningkatkan pendapatan nasional (GNP=7%). Sebagai salah satu negara yang "*Export oriented*" Indonesia sangat mengharapkan sumbangan devisa dari hasil perdagangan internasionalnya. Sayangnya struktur ekspor Indonesia masih didominasi dengan produk yang mengandalkan sumber daya alam seperti *Plywood* dan Tekstil. Sementara negara-negara maju mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup memadai untuk tidak memaksanya melakukan eksploitasi sumber daya alamnya.

Ketika negara-negara berkembang berpikir untuk kepentingan lingkungannya yaitu untuk mengadopsi suatu teknologi guna mendaur ulang limbah suatu pabrik, maka teknologi seperti itu membutuhkan biaya tambahan dalam proses produksinya. Melimpahnya biaya tersebut terhadap harga barang akan membuat harga barang menjadi mahal dan mengurangi daya saingnya di pasaran. Sementara apabila produsen yang memikul sendiri biaya tambahan tersebut akan mengurangi keuntungan yang diperolehnya dan otomatis enggan apabila tidak ada insentif lain.

Apa yang disampaikan oleh Barry C Field⁶, seorang ekonom berikut ini dapat menggambarkan kesulitan yang dialami negara-negara berkembang, mengingat negara berkembang tidak bisa mengadopsi level kualitas lingkungan seperti di negara-negara maju karena hal itu berarti akan mengurangi pendapatan moneter dan memperkecil kapasitas untuk mendukung penduduk mereka.

Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara maju untuk menegatkan standardisasi lingkungan telah menimbulkan biaya tambahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi (seperti industri zat kimia, industri logam). Untuk mengurangi beban biaya tambahan tersebut beberapa industri 'terbang' ke negara-negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang lebih longgar, sehingga industri-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolahan limbah misalnya yang relatif lebih mahal.

Kecenderungan di atas mendapat momentum ketika pada tahun 1980-an sejumlah industri pestisida negara maju mengalir ke negara berkembang. Padahal zat-zat pestisida yang dimaksud sudah lama dilarang pemakaiannya di negara-negara maju karena berbahaya bagi kesehatan. Industri tersebut mendapat sambutan hangat di negara berkembang, waktu itu negara berkembang sedang gencar-gencarnya dengan revolusi hijaunya. Di Indonesia adanya aliran investasi maupun relokasi industri asing dengan motif yang sama disinyalir terjadi juga dengan mengalirnya "dirty industries" dari Jepang maupun Amerika Serikat. Industri kotor merupakan jenis industri yang secara normal mengemisikan lebih besar zat-zat pencemar dari pada industri bersih. Contoh-contoh industri kotor

⁶ Barry C. Field (1994). *Environmental Economics An Introduction*. New York: McGraw-Hill International Editions, hal.402

seperti pabrik kimia, pulp, logam dan produk minyak, maupun pabrik tekstil. Untuk di Indonesia PT Indorayon disinyalir masuk kategori industri kotor.

Upaya Mencari Jalan Tengah

Munculnya kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan hidup secara global mendorong pendekatan untuk menginternalisasikan biaya lingkungan kedalam perhitungan ekonomi. Pendekatan ini mensyaratkan dimasukkannya biaya kerusakan lingkungan dalam biaya sebuah proses produksi. Pada hakekatnya pihak yang menyebabkan degradasi lingkungan bertanggungjawab atas biaya sosial dan biaya ekonomi yang timbul. Prinsip ini dikenal dengan *Polluter Pays principle*.

Para ahli ilmu ekonomi pembangunan memberlakukan istilah "berkelanjutan" (*sustainable*) dalam upaya memperjelas hakekat keseimbangan pembangunan yang paling diinginkan, yakni pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pelestarian lingkungan hidup atau SDA di sisi lain. Meskipun definisinya cukup banyak konsep *Sustainable Development*⁷ mengacu pada pemenuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang. Hal penting yang terkandung secara implisit di dalam pernyataan tersebut adalah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan umat manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Oleh karena itu para perencana pembangunan harus melibatkan Perhitungan Lingkungan (*Environmental Accounting*) dalam perumusan kebijakan-kebijakan mereka. Sebagai contoh, kelestarian atau sebaliknya kerusakan, lingkungan hidup harus dihitung sebagai faktor penambah atau paktor pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemajuan kesejahteraan penduduk secara agregat (keseluruhan). Salah satu alternatif penghitungan lingkungan telah dikemukakan oleh Pearce dan Warford⁸. Dalam pandangan mereka, aset fisik dalam penghitungan lingkungan mencakup semua hal yang berharga, tidak hanya modal-modal manufaktur (mesin, pabrik dan jalan-jalan), tetapi juga modal manusia (pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman) serta modal

⁷ Michael P. Todaro (1999). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, hal 408.

⁸ *Ibid*, hal. 409

lingkungan hidup (*environmental capital*), yakni mulai dari hutan, kualitas tanah, rentang kehijauan yang menyejukkan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas maka *Sustainable Development* mensyaratkan terjaga atau meningkatnya seluruh modal tersebut dari waktu ke waktu (tidak boleh susut). Atas dasar itu kalkulasi GNP harus dikoreksi menjadi NPP (*Sustainable net national product*) atau pendapatan nasional neto yang berkesinambungan.

Selain hal tersebut di atas sebenarnya ada tiga cara pokok bagaimana negara-negara maju bisa membantu negara berkembang untuk memperbaiki kondisi lingkungannya, yaitu⁹: *Pertama*, Liberalisasi perdagangan dengan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan terhadap ekspor negara berkembang. Pembukaan akses yang lebih lebar di pasar-pasar internasional tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah tetapi juga akan memperbesar kemampuan mereka untuk melunasi hutang luar negerinya. Dalam waktu bersamaan mereka akan mampu menurunkan ketergantungannya pada praktek-praktek eksploitasi hutan dan SDA langka, daripada sekedar untuk memperoleh devisa. *Kedua*, Peringan utang-utang luar negeri, dengan program pertukaran utang untuk modal lingkungan (*debt for nature swaps*) merupakan cara yang menarik sekaligus menguntungkan semua pihak. Pada satu sisi, hal itu akan meringankan beban finansial negara berkembang, sedangkan pada sisi lain hal itu menjamin terselamatkannya kelestarian lingkungan global, yang secara langsung akan menyangkut kepentingan negara-negara maju. Dalam pengaturan finansial ini sebuah organisasi swasta pencinta lingkungan hidup AS akan bekerjasama dengan organisasi lingkungan negara berkembang untuk membeli surat utang pemerintah negara berkembang dari pasar uang Internasional dengan potongan harga, katakanlah 30% dari nilai nominalnya. Surat utang tersebut kemudian ditukar dengan obligasi dalam mata uang negara berkembang yang bersangkutan dengan nilai yang sama penuh dengan uang semula. Itu berarti jangka pembayaran utang bagi pemerintah negara berkembang tadi jauh lebih panjang karena pemerintah negara berkembang tidak lagi harus membayarkan sejumlah uang untuk menebus surat utangnya yang sudah ia peroleh kembali itu, melainkan mencicil pembayaran obligasi yang biasanya berjangka panjang.

⁹ *Ibid*, hal 445

Ketiga, Pemberian bantuan finansial dan teknologi. Dalam *World Development Report* terbitan tahun 1992, Bank dunia memperkirakan bahwa negara berkembang akan memerlukan tambahan dana investasi tahunan sebesar 2% hingga 3% untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dana-dana investasi akan sangat dibutuhkan oleh negara berkembang untuk program-program pengentasan kemiskinan, usaha peningkatan pelayanan sosial serta mempromosikan pola-pola produksi yang ramah lingkungan.

Sebagai implikasi pengkaitan lingkungan dan perdagangan, di negara maju muncul fenomena *Green Consumerism*¹⁰ (konsumen hijau), seperti di Jerman, Inggris, Jepang, AS dan lain-lain. Gerakan konsumen hijau merupakan satu bentuk aksi sebagai implementasi dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, yang semakin lama semakin memprihatinkan, sehingga memerlukan solusi berupa aksi konkrit yang datangnya dari masyarakat konsumen. Konsumen dalam hal ini dipandang mempunyai posisi yang strategis sebagai penentu pasar. Perkembangan suatu produk di pasaran atau sebaliknya sangat tergantung pada keputusan konsumen untuk membeli atau menolak produk tersebut.

Fenomena ini belum tampak menonjol di negara berkembang. Hal ini bisa dimaklumi karena kepedulian terhadap lingkungan harganya mahal. Oleh karena itu dibutuhkan sikap *willing to pay* dan *willing to expense*. Misalnya pemakaian kertas yang *recycled*/yang dapat didaur ulang kurang menarik minat konsumen di negara berkembang. Alasannya karena harga yang lebih mahal dan penampilan yang kurang menarik dibandingkan dengan kertas biasa.

Konsumen yang berorientasi pada *green consumerism* memiliki beberapa prinsip tertentu di samping sekedar memperhatikan pada mutu, penampilan, harga, garansi, pelayanan saja, yaitu: *Pertama*, masalah ekologi. Ini berkaitan dengan ada tidaknya unsur pengrusakan lingkungan mulai dari pengadaan bahan bakunya, proses produksi serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang tersebut. Contoh nyata adalah sikap konsumen di AS yang menolak hamburger yang komponen dagingnya dari Brazil, mengingat peternakan sapi di Brazil dilakukan dengan mem-babat hutan tropis mereka. *Kedua*, Masalah etika. Prinsip ini berkaitan

¹⁰ Zumrotin K Susilo, (1998). *Konsumen Hijau, Pola Hidup Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hal 1

dengan apakah produsen menjalankan usahanya dengan benar, tidak memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada di suatu negara. Hal ini tampak jelas pada upaya penerapan standar ganda yang sering dilakukan oleh produsen dari negara maju. Negara maju karena standar lingkungan yang tinggi tidak diperkenankan menggunakan CFC. Akan tetapi justru mereka memproduksi barang yang sama yang menggunakan CFC untuk dipasarkan di negara berkembang tertentu yang mempunyai standar lingkungan yang longgar. Hal seperti ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. *Ketiga*, masalah keadilan. Pertimbangannya adalah apakah produksi tersebut mengeksploitasi SDA dan ekonomi lokal, apakah pengusaha mengupayakan pelestarian dengan perhitungan yang tetap atas eksploitasi yang mereka lakukan sehingga ada kontinuitas. Dalam perkembangannya konsumen juga telah mempertimbangkan keadilan dalam sistem penggajian dan penggunaan tenaga kerja anak-anak.¹¹

Fenomena lain yang terkait dengan lingkungan hidup adalah kebutuhan akan *cleaner production*. Konsep teknologi bersih adalah kajian tentang teknologi pengolahan meminimalkan pencemaran yaitu menurunkan dampak negatif terhadap komponen lingkungan, termasuk di dalamnya menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran fisik, kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya.¹² Konsep *cleaner Production* telah dikenal sejak tahun 1990 ketika UNEP meluncurkan *cleaner production programme*. Pada saat KTT bumi di Rio tahun 1992, *Cleaner production* secara resmi diperkenalkan UNCED sebagai prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan dimasukkan dalam program aksi yang dikenal dengan nama agenda 21.

UNEP mendefinisikan *cleaner production*¹³ sebagai berikut :

1. Pengaplikasian strategi lingkungan preventif yang terintegrasi secara berkesinambungan terhadap proses dan produk guna mengurangi resiko baik terhadap manusia dan lingkungan.
2. Pada tahap proses produksi, *cleaner production* mensyaratkan konservasi *raw materials* dan energi, pengurangan pemanfaatan ba-

¹¹ *Ibid*, hal 4

¹² Nico Ngani dan Tontje Tunai, ed. (1994). *Dialog antara Teolog dan Teknologi*. Yogyakarta: Liberty, hal.61

¹³ UNEP, *Industry and Environment*, October-December 1994, hal.4

han-bahan berbahaya, mengurangi kuantitas dan bahaya semua emisi dan limbah sebelum produk selesai diproduksi.

3. Untuk produk, *cleaner production* memfokuskan pada pengurangan dampak negatif pada keseluruhan daur hidup produk tersebut, sejak mulai ekstraksi *raw materials* sampai dengan pembuangan sampahnya.

Dengan demikian proses produksi akan bergerak kearah *zero waste/pollution* dan produk akan dikelola sepanjang daur hidupnya yang dimulai sejak pengambilan *raw materials*, proses manufaktur, pemanfaatan sampai pada saat pembuangan. *Cleaner production* akan menghasilkan produk bersih yang kemudian meningkatkan keuntungan pendapatan pasar, baik pasar lokal maupun ekspor dan sebaliknya kegagalan mengadopsi *cleaner production* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan yaitu kesempatan memperoleh keuntungan yang dapat diperolehnya.

Cleaner production menghendaki investasi baru untuk mendapatkan teknologi bersih. Di negara berkembang dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami, sektor industri sering mengalami kondisi-kondisi yang tidak mendukung. Misalnya perusahaan-perusahaan besar seringkali merupakan perusahaan umum yang dinasionalisasi berdasarkan alasan-alasan politik daripada alasan manajemen ekonomi. Industri-industri yang berkembang di negara berkembang memiliki jenis teknologi yang telah usang akibatnya tidak kompetitif. Kondisi-kondisi seperti upah buruh yang murah, pasar yang proteksionis, peraturan lingkungan yang relatif longgar dan keterbatasan dana untuk keperluan investasi baru membawa dampak perusahaan lebih menekankan kelangsungan hidup jangka pendek daripada mempertimbangkan kepentingan jangka panjang yang menyangkut isu lingkungan hidup. Akibatnya negara berkembang banyak mengalami kerusakan-kerusakan lingkungan sebagai *side effect*.

Keuntungan pokok yang didapatkan perusahaan melalui *cleaner production* adalah perolehan peningkatan ekonomi dari¹⁴ :

1. Penghematan secara langsung dari energi, bahan baku, waktu, dan lain-lain.

¹⁴ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), *Proceedings of the Conference on ecologically sustainable industrial Development*, Copenhagen, Denmark, 14-18 Oktober 1991, hal 104-105

2. Keuntungan secara langsung dari produk yang kompetitif dan kesempatan pasar lokal maupun ekspor yang lebih baik karena adanya produk yang diproses dengan ramah lingkungan terutama pasar di negara maju.
3. Penghematan secara tidak langsung dari pengurangan limbah, jika limbah tersebut dapat didaur ulang dan dijual atau karena biaya pembuangannya lebih rendah
4. Penghematan secara tidak langsung karena pengurangan resiko dari penghindaran pajak lingkungan, hukuman yang berhubungan dengan peraturan tentang polusi dan kerusakan-kerusakan dan tekanan-tekanan lainnya.

Alasan utama untuk mendorong pemakaian *cleaner production* adalah karena mampu mengkombinasikan antara keuntungan ekonomi dan keuntungan lingkungan. Sehingga diharapkan hubungan kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan tidak lagi saling bertentangan. Fenomena *green consumerism* dan kebutuhan akan *cleaner production* tersebut dapat menghadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon “moralitas”, dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tetapi tetap mampu menggiring dalam nuansa hijau.

Dalam rangka mencapai produk yang ramah lingkungan dikenal pula pola manajemen bisnis “ekoefisiensi”. Pada prinsipnya ekoefisiensi adalah manajemen bisnis dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dan ekologi yaitu meminimalkan penggunaan bahan dan energi serta dampak lingkungan per satuan produk. Prinsip ekoefisiensi memberi keuntungan pada industri melalui tiga hal yaitu menurunkan biaya per satuan produk, menurunkan dampak negatif lingkungan per satuan produk dan menaikkan daya saing perusahaan.

Dari berbagai macam pendekatan di atas, Indonesia sebagai negara berkembang bisa memilih salah satu pendekatan untuk menjembatani antara perdagangan bebas dan isu lingkungan, tergantung dari kemampuan pemerintah Indonesia. Dari semua kemelut ini satu yang tetap dan harus selalu ada adalah wacana ekologis harus terus menerus dikonstruksikan paling tidak untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang merupakan “titipan anak cucu” generasi mendatang.

Kesimpulan

Dengan sedikit optimis tulisan ini mencoba untuk memperkecil *gap* yang ada, karena pada hakekatnya liberalisasi perdagangan dan kerusakan lingkungan terus menerus bergerak semakin berpacu. Wacana *sustainable Development* ditawarkan sebagai jalan tengah bagi permasalahan yang penuh dengan konteks eksploitasi negara maju terhadap negara berkembang untuk kemudian menggiring dalam perdagangan yang lebih hijau, penetapan biaya lingkungan hidup, standarisasi *ecolabelling* dan *ISO 14000*, penghapusan hambatan-hambatan perdagangan negara berkembang serta bantuan finansial dan teknologi.

Dilema muncul ketika harus mendahulukan salah satu, tentunya ada yang dikorbankan. Mana yang mudah untuk dilakukan tanpa harus bersusah-susah itulah yang dipilih. Indonesia, sebagai negara berkembang, sangat rentan sekali terhadap kerusakan lingkungan karena kebijakan perdagangan berbasis pada sumber daya alam. Bagi pemerintah ini mudah dilakukan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa “dijual” dengan seenaknya untuk mencari “untung tetapi malah buntung”, karena biaya yang harus ditanggung sangat mahal yaitu kerusakan lingkungan. Belum lagi Indonesia sebagai tempat “buangan limbah” dari negara maju, yang semakin lama memunculkan masalah yang semakin kompleks bagi masyarakat dan lingkungannya.

Masalah lingkungan adalah masalah bersama, untuk itu semua negara harus bekerjasama dengan menciptakan kerangka global, yaitu: *Pertama*, bagi negara maju, dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadikan isu lingkungan sebagai alat dominasi baru atas negara berkembang, persoalan lingkungan terkait erat dengan negara maju yang kebetulan mempunyai sumberdaya keuangan dan kemampuan ekonomi untuk menguramgi tingkat-tingkat pengeluaran dan konsumsi mereka, pola-pola konsumsi dan produksi dapat dirubah menjadi lebih berwawasan lingkungan. *Kedua*, negara berkembang, khususnya Indonesia, bisa mengadopsi pembangunan yang lebih adil dan berwawasan lingkungan dengan melakukan distribusi sumberdaya yang lebih adil, misalnya tanah dan akses yang lebih besar pada produk-produk kebutuhan dan perumahan. Prioritas perekonomian harus digeser pada produksi barang-barang dan jasa yang utama agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Investasi (termasuk proyek-proyek pemerintah) harus diarahkan pada

penyediaan infrastruktur dasar dan proses produksi dan bukan sebagai proyek-proyek kemewahan dan simbol-simbol peningkatan status. Investasi sosial terutama yang berbentuk pemeliharaan kesehatan dasar, pendidikan, perumahan bagi rakyat, transportasi umum dan kegiatan-kegiatan budaya populer. Investasi demikian ini dapat menyerap sebagian besar pembelanjaan nasional. Investasi harus mampu mengurangi produksi dan penggalian komoditas primer yang secara otomatis akan mengurangi masalah penipisan SDA. Menurunnya volume ekspor dan volume produksi dapat ditutup apabila harga komoditas naik, dan pajak lingkungan hidup, misalnya pajak pada energi akan menolong membatasi biaya-biaya perdagangan lingkungan hidup dengan cara mendorong penggunaan transportasi yang paling hemat energi.

Hanya kesadaran dari negara maju sangat diharapkan untuk mengurangi emisi, mengembangkan teknologi bersih bagi diri mereka sendiri maupun bagi negara berkembang, serta menurunkan pola-pola dan tingkat permintaan mereka (konsumerisme) yang cenderung merusak lingkungan. Dalam hal ini negara berkembang seperti Indonesia setidaknya mempunyai sedikit posisi tawar: Tanpa kerjasama mereka maka tidak akan ada disana "tawar menawar global" untuk mengurangi emisi karbondioksida atau perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan hutan-hutan dunia. Harga dari kerjasama itu adalah berupa uang -berjumlah sangat banyak - yang tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi pembangunan, yaitu "pembangunan yang berkelanjutan". Dengan demikian kemiskinan dapat diatasi dengan mengubah cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Cara meningkatkan pendapatan tidak boleh lagi hanya lewat jalur ekonomi, tetapi lewat jalur sosial dan lingkungan. Artinya faktor biaya lingkungan dan sosial harus masuk ke biaya produksi, karena selama ini biaya lingkungan dan sosial dipikul oleh rakyat. Inilah bentuk baru ekonomi pembangunan yang di sebut sebagai ekonomi berkelanjutan. Dengan mengacu pada hal tersebut di atas diharapkan bahwa gerakan lingkungan menjadi "enteng" dalam memasukkan nilai-nilai environmentalisme untuk menggantikan nilai-nilai dasar yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan.*****

Daftar Pustaka

- Baiquni, M dan Susilawardani, (2002). *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana.
- Field, Barry C. (1994). *Environmental Economics An Introduction*. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Mansbach, Richard W. (1997). *Global Puzzle: Issues and Actors in Global Politics*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Ngani, Nico dan Tontje Tunai (ed). (1994). *Dialog antara Teolog dan Teknologi*. Yogyakarta: Liberty
- Poot, Huib, Arie Kuyvenhoven, Jaap Jansen. (1990). *Industrialisation and Trade in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwo Santoso, *Pengelolaan Negara, Mekanisme Pasar dan Dinamika ekosistem : Tiga Medium interaksi pemerintahan*, dalam jurnal Transformasi Vol.1, no.1, September 2003
- Susilo, Zumrotin K. (1998). *Konsumen Hijau, Pola Hidup Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Todaro, Michael P. (1999). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- UNEP, *Industry and Environment*, October-December 1994
- UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), *Proceedings of the Conference on ecologically sustainable industrial Development*, Copenhagen, Denmark, 14-18 Oktober 1991
- Kompas, Senin 27 Mei 2002
- Kompas, Kamis 01 Maret 2007
- INFO RIO+10, diterbitkan oleh Konphalindo dalam <http://www.pelangi.or.id/resources>